



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Peternakan Nomor 485-Disnak/Prod/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi.
2. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor 500 – 411/DPK-LKT/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi.
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 525-3684/HUTBUN-III/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Rencana Sebaran Per Kecamatan Pupuk Bersubsidi Sub. Sektor Perkebunan Kabupaten Langkat Tahun 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai ketingkat petani;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, perlu ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten;
- d. bahwa alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi pada Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan tidak membutuhkan pupuk tersebut maka akan direalokasikan kepada Dinas instansi yang membutuhkan sesuai dengan surat Dinas Peternakan Nomor 485 – Disnak /Prod / XII / 2013 dan Dinas Perikanan Kelautan Nomor 500 – 411 / DPK – LKT / 2014

e. bahwa berdasarkan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 9);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Madya Daerah Tk II Binjai, Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk.II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indoneia nomor 4254);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122 / Permentan / SR.130 / 11 / 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

12. Peraturan Daerah

af

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

11. Pembudidaya ikan



11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
14. Pelaksanaan subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

Alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis Pupuk, Jumlah kebutuhan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Alokasi Pupuk Bersubsidi berasal dari usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan atau Udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau KUPTD Instansi terkait di Kecamatan masing – masing.

Pasal 5

Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudiyaan ikan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok taninya masing – masing untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

24

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi bilamana terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (Enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penyalur di lini III dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk menjamin

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea | Rp. 1.800,- per kg |
| b. Pupuk SP-36 | Rp. 2.000,- per kg |
| c. Pupuk ZA | Rp. 1.400,- per kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | Rp. 2.300,- per kg |
| e. Pupuk Organik | Rp. 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

Pupuk Urea	50 kg
Pupuk SP-36	50 kg
Pupuk ZA	50 kg
Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	50 kg atau 20 kg
Pupuk Organik	40 atau 20 kg

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah " Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB IV **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 12

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lini I s/d lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 13

24

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah wajib melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dan Pestisida.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 14

Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

Peraturan Bupati Langkat nomor 01 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati Langkat ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Langkat.

Pasal 17

Peraturan Bupati Langkat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Langkat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 8 Januari 2014

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 8 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. INDRA SALAHUDIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR 01

JABATAN		PARAF
PLT. SEKRETARIS DAERAH	AERON	8/1-14
KEBANGSAAN	Ekbangsa	8/1-14
KEHUKUM	T. Hukum	8/1-14
STAF BAGIAN HUKUM		8/1-14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR 01 TAHUN 2014
 TANGGAL 8 Januari 2014

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 KABUPATEN LANGKAT MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS
 (TON)

NO	SUB SEKTOR	UREA	NPK PHOSKA	ZA	SP-36	ORGANIK
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.559	7.673	2.193	3.511	2.480
2	Perkebunan	1.120	912	926	250	-
3	Peternakan	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-
	Jumlah	11.679	8.585	3.119	3.761	2.480

JABATAN	PARAF
PK. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Eksternal	
KABID HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

21

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TANGGAL : 8 JANUARI 2014

TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 KABUPATEN LANGKAT MENURUT JENIS DAN SEBARAN PER – KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Bahorok	370	119	101	308	103
2	Salapian	82	36	48	109	26
3	Kutambaru	39	14	27	31	17
4	Serapit	681	218	169	456	32
5	Kuala	541	133	92	372	127
6	Sei Bingei	1.821	720	432	1.446	229
7	Selesei	647	225	162	453	128
8	Binjai	784	191	137	592	144
9	Stabat	615	170	232	443	137
10	Wampu	332	109	115	274	142
11	Secanggang	1.162	368	305	629	181
12	Batang Serangan	100	39	39	60	17
13	Sawit Seberang	37	21	60	25	17
14	Padang Tualang	188	63	72	228	157
15	Hinai	631	172	164	386	129
16	Tanjung Pura	643	211	155	410	164
17	Gebang	580	185	121	417	114
18	Babalan	561	194	174	552	167
19	Sei Lapan	419	124	133	325	135
20	Brandan Barat	281	97	95	309	97
21	Besitang	387	104	105	361	97
22	Pematang Jaya	166	55	35	72	0
23	Pangkalan Susu	512	193	146	327	120
	Jumlah	11.679	3.761	3.119	8.585	2.480

JABATAN PARU

W. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADM Ekbangs

KABAG HUKUM

KASUBBAG T-Hukum

STAF BAGIAN HUKUM

18/1-14

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Lampiran II.1 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	13.00	23.00	23.00	12.00	90.00	23.00	23.00	12.00	13.00	92.00	16.00	10.00	350.00
2	Salapian	0.00	2.00	22.00	14.00	1.00	1.00	1.00	15.00	1.00	1.00	1.00	0.00	59.00
3	Kutamburu	0.00	0.00	1.00	3.00	5.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	19.00
4	Serapit	138.00	1.00	91.00	46.00	26.00	0.00	57.00	95.00	109.00	0.00	37.00	16.00	616.00
5	Kuala	35.00	27.00	35.00	45.00	30.00	14.00	26.00	80.00	45.00	35.00	70.00	74.00	516.00
6	Sei Bingei	0.00	355.00	217.00	350.00	165.00	50.00	44.00	293.00	100.00	55.00	60.00	79.00	1,768.00
7	Selesei	35.00	55.00	50.00	60.00	70.00	72.00	40.00	32.00	65.00	85.00	35.00	17.00	616.00
8	Binjai	0.00	210.00	74.00	0.00	90.00	128.00	37.00	37.00	70.00	110.00	0.00	0.00	754.00
9	Stabat	45.00	83.00	26.00	72.00	0.00	58.00	0.00	43.00	63.00	72.00	0.00	33.00	495.00
10	Wampu	20.00	58.00	38.00	0.00	58.00	46.00	0.00	0.00	1.00	39.00	21.00	0.00	281.00
11	Secanggang	0.00	28.00	78.00	0.00	150.00	249.00	104.00	21.00	40.00	164.00	195.00	76.00	1,105.00
12	Bt. Serangan	0.00	1.00	18.00	21.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	12.00	0.00	73.00
13	Sw. Seberang	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
14	Pd. Tualang	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	26.00	0.00	0.00	21.00	23.00	33.00	0.00	168.00
15	Hinai	36.00	42.00	0.00	61.00	92.00	0.00	0.00	55.00	152.00	0.00	0.00	43.00	481.00
16	Tj. Pura	58.00	57.00	240.00	0.00	0.00	94.00	68.00	0.00	0.00	0.00	73.00	63.00	653.00
17	Gebang	0.00	0.00	1.00	1.00	101.00	167.00	0.00	0.00	1.00	111.00	148.00	0.00	530.00
18	Babalan	0.00	1.00	0.00	0.00	78.00	95.00	64.00	0.00	30.00	105.00	70.00	79.00	522.00
19	Sei Lapan	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	78.00	20.00	0.00	0.00	100.00	73.00	25.00	369.00
20	Brd. Barat	1.00	1.00	1.00	39.00	90.00	1.00	1.00	1.00	1.00	69.00	56.00	0.00	261.00
21	Besitang	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	75.00	0.00	0.00	0.00	65.00	77.00	0.00	282.00
22	Pematang Jaya	0.00	1.00	1.00	1.00	76.00	1.00	1.00	0.00	50.00	20.00	1.00	0.00	152.00
23	Pki. Susu	0.00	0.00	0.00	44.00	88.00	88.00	0.00	86.00	33.00	134.00	0.00	0.00	482.00
	Jumlah	381.00	945.00	917.00	770.00	1,428.00	1,269.00	489.00	572.00	798.00	1,295.00	979.00	515.00	10,559.00

PIK SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN AOM Ekhangsos
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG T. Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT
 H. NGOGESA SITEPU

34

Lampiran II.2 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
2	Salapian	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	23.00
3	Kutambaru	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
4	Serapit	0.00	0.00	5.00	7.00	10.00	9.00	0.00	5.00	7.00	9.00	8.00	5.00	65.00
5	Kuala	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	3.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	25.00
6	Sei Bingei	0.00	0.00	6.00	7.00	9.00	4.00	0.00	6.00	7.00	8.00	4.00	2.00	53.00
7	Seleseai	0.00	0.00	6.00	13.00	15.00	6.00	0.00	5.00	6.00	14.00	12.00	4.00	81.00
8	Binjai	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	4.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.00	30.00
9	Stabat	0.00	0.00	12.00	18.00	22.00	9.00	0.00	10.00	18.00	22.00	5.00	4.00	120.00
10	Wampu	0.00	0.00	5.00	7.00	7.00	6.00	0.00	2.00	5.00	7.00	7.00	5.00	51.00
11	Secanggang	0.00	0.00	4.00	8.00	10.00	6.00	0.00	3.00	7.00	8.00	8.00	3.00	57.00
12	Bt. Serangan	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	5.00	0.00	27.00
13	Sw. Seberang	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	4.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.00	30.00
14	Pd. Tualang	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	20.00
15	Hinai	0.00	0.00	12.00	20.00	25.00	18.00	0.00	10.00	13.00	23.00	20.00	9.00	150.00
16	Tj. Pura	0.00	0.00	4.00	5.00	6.00	5.00	0.00	2.00	5.00	6.00	4.00	3.00	40.00
17	Gebang	0.00	0.00	4.00	5.00	7.00	4.00	0.00	5.00	6.00	9.00	7.00	3.00	50.00
18	Babalan	0.00	0.00	4.00	5.00	6.00	4.00	0.00	3.00	4.00	6.00	5.00	2.00	39.00
19	Sei Lapan	0.00	0.00	4.00	6.00	7.00	4.00	0.00	5.00	6.00	9.00	7.00	2.00	50.00
20	Brd. Barat	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	1.00	20.00
21	Besitang	0.00	0.00	8.00	14.00	18.00	12.00	0.00	4.00	8.00	18.00	18.00	5.00	105.00
22	Pematang Jaya	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	14.00
23	Pkl. Susu	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	0.00	2.00	3.00	6.00	4.00	3.00	30.00
	Jumlah	0.00	0.00	96.00	148.00	183.00	112.00	0.00	80.00	121.00	178.00	139.00	63.00	1,120.00

PIL. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM. Eksekutif
 KABAG. HUKUM
 KASUBBAG T. Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

34

Lampiran 11.3 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUPERHOS (SP-36) BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	2.00	5.00	27.00	24.00	3.00	5.00	5.00	3.00	23.00	9.00	4.00	1.00	111.00
2	Salapian	1.00	1.00	6.00	4.00	1.00	1.00	2.00	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	25.00
3	Kutambaru	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	6.00
4	Serapit	35.00	1.00	23.00	15.00	28.00	16.00	18.00	23.00	25.00	0.00	18.00	5.00	207.00
5	Kuala	19.00	7.00	15.00	8.00	7.00	2.00	7.00	10.00	14.00	7.00	18.00	8.00	122.00
6	Sei Bingei	74.00	22.00	48.00	88.00	52.00	25.00	12.00	85.00	30.00	13.00	18.00	242.00	709.00
7	Selese	14.00	24.00	24.00	19.00	15.00	21.00	20.00	17.00	20.00	18.00	11.00	9.00	212.00
8	Binjai	3.00	39.00	15.00	13.00	16.00	40.00	3.00	4.00	6.00	39.00	2.00	0.00	180.00
9	Stabat	29.00	10.00	8.00	20.00	0.00	18.00	0.00	15.00	22.00	22.00	0.00	11.00	155.00
10	Wampu	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	14.00	0.00	0.00	1.00	23.00	6.00	0.00	98.00
11	Secanggang	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	81.00	46.00	20.00	13.00	40.00	72.00	32.00	355.00
12	Bt. Serangan	0.00	2.00	5.00	7.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	31.00
13	Sw. Seberang	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
14	Pd. Tualang	1.00	1.00	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	4.00	7.00	11.00	4.00	52.00
15	Hinal	11.00	15.00	0.00	20.00	30.00	0.00	2.00	17.00	49.00	0.00	0.00	13.00	157.00
16	Tj. Pura	30.00	41.00	1.00	2.00	2.00	40.00	33.00	3.00	1.00	0.00	24.00	23.00	200.00
17	Gebang	0.00	0.00	1.00	1.00	41.00	51.00	0.00	0.00	1.00	34.00	45.00	0.00	174.00
18	Babalan	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	40.00	16.00	0.00	9.00	41.00	27.00	14.00	183.00
19	Sei Lapan	0.00	0.00	1.00	0.00	54.00	1.00	0.00	1.00	0.00	54.00	0.00	0.00	111.00
20	Brd. Barat	1.00	1.00	1.00	12.00	28.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00	18.00	0.00	86.00
21	Besitang	2.00	2.00	0.00	1.00	20.00	22.00	0.00	1.00	0.00	19.00	24.00	0.00	91.00
22	Pematang Jaya	0.00	1.00	1.00	1.00	24.00	1.00	1.00	1.00	16.00	8.00	1.00	0.00	55.00
23	Pkl. Susu	0.00	0.00	0.00	18.00	30.00	41.00	0.00	21.00	16.00	55.00	0.00	0.00	181.00
	Jumlah	241.00	191.00	178.00	255.00	472.00	143.00	169.00	231.00	258.00	417.00	303.00	365.00	3,511.00

PIK
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM Eksternal
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG T-Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT
 H. NGOGESA SITEPU

4

Lampiran II.4 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUPERHOS (SP-36) BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	8.00
2	Salapian	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
3	Kutambaru	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	8.00
4	Serapit	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
5	Kuala	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
6	Sei Bingei	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
7	Selese	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	13.00
8	Binjai	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
9	Stabat	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	15.00
10	Wampu	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
11	Secanggang	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	13.00
12	Bt. Serangan	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	8.00
13	Sw. Seberang	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
14	Pd. Tualang	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
15	Hinai	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	15.00
16	Tj. Pura	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
17	Gebang	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
18	Babalan	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
19	Sei Lapan	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	13.00
20	Brd. Barat	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	11.00
21	Besitang	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	13.00
22	Pematang Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Pkl. Susu	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	12.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	42.00	0.00	0.00	27.00	47.00	22.00	0.00	250.00

PL SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADM Ekhangas

KABAG HUKUM

KASUBBAG T. Hukum

STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

3

Lampiran II.5 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	1.00	3.00	16.00	14.00	2.00	3.00	3.00	1.00	13.00	4.00	2.00	1.00	63.00
2	Salapian	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	16.00
3	Kutambaru	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00
4	Serapit	26.00	12.00	16.00	8.00	17.00	0.00	10.00	17.00	15.00	0.00	11.00	3.00	135.00
5	Kuala	5.00	4.00	8.00	15.00	4.00	1.00	1.00	5.00	8.00	3.00	10.00	6.00	70.00
6	Sei Bingei	56.00	12.00	41.00	65.00	31.00	28.00	5.00	63.00	17.00	30.00	11.00	15.00	374.00
7	Selese	8.00	13.00	14.00	16.00	9.00	12.00	17.00	9.00	11.00	10.00	6.00	5.00	130.00
8	Binjai	2.00	23.00	8.00	0.00	9.00	23.00	8.00	7.00	4.00	23.00	1.00	0.00	108.00
9	Stabat	17.00	10.00	10.00	11.00	0.00	10.00	0.00	8.00	12.00	13.00	0.00	6.00	97.00
10	Wampu	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	1.00	12.00	9.00	0.00	60.00
11	Secanggang	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	45.00	33.00	9.00	14.00	29.00	49.00	19.00	247.00
12	Bt. Serangan	0.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.00
13	Sw. Seberang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Pd. Tualang	1.00	1.00	0.00	0.00	13.00	12.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6.00	2.00	40.00
15	Hinai	6.00	8.00	0.00	11.00	17.00	0.00	7.00	15.00	29.00	0.00	0.00	7.00	100.00
16	Tj. Pura	23.00	23.00	1.00	1.00	7.00	29.00	22.00	1.00	1.00	0.00	14.00	13.00	135.00
17	Gebang	0.00	0.00	1.00	1.00	16.00	26.00	0.00	0.00	1.00	20.00	26.00	0.00	91.00
18	Babalan	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	26.00	14.00	0.00	11.00	30.00	21.00	14.00	144.00
19	Sei Lapan	0.00	0.00	1.00	0.00	32.00	6.00	0.00	1.00	0.00	38.00	0.00	0.00	78.00
20	Brd. Barat	1.00	1.00	1.00	7.00	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	15.00	0.00	63.00
21	Besitang	1.00	1.00	0.00	1.00	16.00	13.00	0.00	1.00	0.00	16.00	20.00	0.00	69.00
22	Pematang Jaya	0.00	1.00	1.00	1.00	14.00	1.00	1.00	1.00	9.00	5.00	1.00	0.00	35.00
23	Pkl. Susu	0.00	0.00	0.00	18.00	16.00	24.00	0.00	12.00	11.00	33.00	0.00	0.00	116.00
	Jumlah	158.00	125.00	126.00	175.00	109.00	270.00	124.00	155.00	162.00	292.00	204.00	93.00	2,193.00

SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN DAERAH Eksternal
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG T-Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Lampiran II.6 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	0.00	0.00	5.00	7.00	5.00	2.00	0.00	0.00	5.00	7.00	5.00	2.00	38.00
2	Salapian	0.00	0.00	5.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	5.00	0.00	32.00
3	Kutambaru	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	0.00	22.00
4	Serapit	0.00	0.00	4.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	7.00	0.00	34.00
5	Kuala	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	0.00	22.00
6	Sei Bingei	0.00	0.00	7.00	9.00	10.00	3.00	0.00	0.00	7.00	9.00	10.00	3.00	58.00
7	Selese	0.00	0.00	4.00	5.00	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	5.00	4.00	0.00	32.00
8	Binjai	0.00	0.00	3.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	7.00	0.00	29.00
9	Stabat	0.00	0.00	5.00	20.00	30.00	10.00	5.00	20.00	30.00	10.00	5.00	0.00	135.00
10	Wampu	0.00	0.00	4.00	8.00	9.00	4.00	0.00	2.00	6.00	10.00	8.00	4.00	55.00
11	Secanggang	0.00	0.00	8.00	9.00	8.00	4.00	0.00	4.00	5.00	9.00	8.00	3.00	58.00
12	Bt. Serangan	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	0.00	22.00
13	Sw. Seberang	0.00	0.00	8.00	10.00	8.00	4.00	0.00	2.00	6.00	10.00	8.00	4.00	60.00
14	Pd. Tualang	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	0.00	32.00
15	Hinal	0.00	0.00	9.00	10.00	10.00	3.00	0.00	0.00	9.00	13.00	10.00	0.00	64.00
16	Tj. Pura	0.00	0.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	2.00	0.00	20.00
17	Gebang	0.00	0.00	3.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	4.00	0.00	30.00
18	Babalan	0.00	0.00	4.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	5.00	0.00	30.00
19	Sei Lapan	0.00	0.00	4.00	8.00	9.00	4.00	0.00	2.00	6.00	10.00	8.00	4.00	55.00
20	Brd. Barat	0.00	0.00	5.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	5.00	0.00	32.00
21	Besitang	0.00	0.00	5.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	5.00	0.00	36.00
22	Pematang Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Pkl. Susu	0.00	0.00	3.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	4.00	0.00	30.00
	Jumlah	0.00	0.00	100.00	167.00	162.00	34.00	5.00	32.00	126.00	165.00	125.00	20.00	926.00

700 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN DAERAH EKSPANSI
 KASABAG HUKUM
 KASUBBAG T-Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

3

Lampiran II.7 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK (PHONSKA) BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	13.00	17.00	46.00	41.00	14.00	17.00	17.00	14.00	41.00	21.00	20.00	22.00	283.00
2	Salapian	1.00	1.00	9.00	5.00	1.00	1.00	3.00	28.00	3.00	26.00	1.00	0.00	79.00
3	Kutambaru	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	6.00
4	Serapit	45.00	11.00	42.00	28.00	43.00	0.00	33.00	40.00	43.00	35.00	45.00	31.00	396.00
5	Kuala	22.00	19.00	28.00	20.00	19.00	23.00	39.00	23.00	28.00	43.00	43.00	35.00	342.00
6	Sei Bingei	133.00	38.00	93.00	148.00	80.00	25.00	123.00	151.00	177.00	127.00	233.00	58.00	1,386.00
7	Selesei	28.00	40.00	42.00	35.00	31.00	37.00	36.00	25.00	31.00	33.00	29.00	21.00	368.00
8	Binjai	15.00	57.00	28.00	10.00	32.00	63.00	114.00	25.00	69.00	62.00	62.00	20.00	557.00
9	Stabat	48.00	23.00	20.00	35.00	10.00	33.00	35.00	22.00	38.00	39.00	35.00	23.00	361.00
10	Wampu	33.00	33.00	10.00	10.00	33.00	28.00	10.00	20.00	12.00	26.00	18.00	20.00	253.00
11	Secanggang	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	71.00	87.00	88.00	98.00	87.00	62.00	12.00	604.00
12	Bt. Serangan	0.00	2.00	7.00	8.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	5.00	2.00	4.00	37.00
13	Sw. Seberang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Pd. Tualang	11.00	11.00	10.00	10.00	29.00	23.00	10.00	46.00	15.00	19.00	24.00	0.00	208.00
15	Hinai	24.00	29.00	10.00	36.00	41.00	10.00	12.00	21.00	68.00	35.00	10.00	12.00	308.00
16	Tj. Pura	60.00	59.00	11.00	13.00	12.00	73.00	52.00	25.00	11.00	10.00	42.00	17.00	385.00
17	Gebang	10.00	10.00	11.00	11.00	47.00	54.00	10.00	48.00	36.00	55.00	45.00	20.00	357.00
18	Babalan	10.00	11.00	10.00	10.00	70.00	77.00	31.00	84.00	72.00	78.00	38.00	21.00	512.00
19	Sei Lapan	10.00	10.00	11.00	10.00	73.00	11.00	10.00	46.00	10.00	74.00	20.00	10.00	295.00
20	Brd. Barat	11.00	11.00	11.00	25.00	47.00	11.00	11.00	20.00	36.00	58.00	23.00	10.00	274.00
21	Besitang	12.00	12.00	10.00	11.00	35.00	39.00	11.00	44.00	10.00	51.00	38.00	10.00	283.00
22	Pematang Jaya	0.00	1.00	1.00	1.00	31.00	1.00	1.00	4.00	20.00	11.00	1.00	0.00	72.00
23	Pkl. Susu	0.00	0.00	0.00	31.00	50.00	40.00	0.00	54.00	62.00	50.00	0.00	0.00	287.00
	Jumlah	486.00	395.00	411.00	499.00	192.00	538.00	647.00	830.00	886.00	946.00	791.00	346.00	7,673.00

114. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN DAERAH Eksternal
 KABAG HUKUM
 KASUBAG T. Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT
 H. NEGESA SITEPU

Lampiran II.8 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK (PHONSKA) BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	25.00
2	Salapian	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	5.00	4.00	2.00	30.00
3	Kutambaru	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	25.00
4	Serapit	0.00	4.00	5.00	8.00	6.00	4.00	0.00	4.00	6.00	10.00	8.00	5.00	60.00
5	Kuala	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	5.00	4.00	2.00	30.00
6	Sei Bingei	0.00	4.00	5.00	8.00	6.00	4.00	0.00	4.00	6.00	10.00	8.00	5.00	60.00
7	Selese	0.00	4.00	6.00	8.00	6.00	4.00	0.00	4.00	7.00	11.00	9.00	6.00	65.00
8	Binjai	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	0.00	2.00	4.00	7.00	6.00	2.00	35.00
9	Stabat	0.00	7.00	10.00	12.00	7.00	5.00	0.00	8.00	10.00	12.00	9.00	2.00	82.00
10	Wampu	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	2.00	21.00
11	Secanggang	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.00	25.00
12	Bt. Serangan	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	2.00	23.00
13	Sw. Seberang	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.00	25.00
14	Pd. Tualang	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	20.00
15	Hinal	0.00	5.00	10.00	12.00	8.00	4.00	0.00	5.00	10.00	12.00	8.00	4.00	78.00
16	Tj. Pura	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.00	25.00
17	Gebang	0.00	4.00	5.00	8.00	6.00	4.00	0.00	4.00	6.00	10.00	8.00	5.00	60.00
18	Babalan	0.00	2.00	3.00	6.00	5.00	2.00	0.00	3.00	4.00	7.00	6.00	2.00	40.00
19	Sei Lapan	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	5.00	4.00	2.00	30.00
20	Brd. Barat	0.00	2.00	3.00	5.00	4.00	2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	5.00	2.00	35.00
21	Besitang	0.00	5.00	10.00	12.00	8.00	4.00	0.00	5.00	10.00	12.00	8.00	4.00	78.00
22	Pematang Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Pkl. Susu	0.00	2.00	3.00	6.00	5.00	2.00	0.00	3.00	4.00	7.00	6.00	2.00	40.00
	Jumlah	0.00	51.00	90.00	125.00	105.00	67.00	0.00	60.00	102.00	149.00	122.00	61.00	912.00

SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN EKSPANSI
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG T. Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Lampiran II.9 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor 01 Tahun 2014
 Tanggal 8 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2013
 DI KABUPATEN LANGKAT**

(Ton)

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	9.00	9.00	5.00	4.00	10.00	8.00	9.00	3.00	9.00	12.00	11.00	16.00	103.00
2	Salapian	7.00	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	26.00
3	Kutambaru	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00
4	Serapit	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	5.00	32.00
5	Kuala	13.00	15.00	7.00	13.00	10.00	11.00	10.00	6.00	13.00	8.00	2.00	19.00	127.00
6	Sei Bingei	17.00	27.00	12.00	34.00	12.00	18.00	20.00	9.00	17.00	22.00	21.00	20.00	229.00
7	Selesei	12.00	10.00	15.00	10.00	12.00	11.00	7.00	5.00	10.00	9.00	13.00	14.00	128.00
8	Binjai	13.00	10.00	12.00	10.00	16.00	10.00	13.00	7.00	14.00	8.00	14.00	17.00	144.00
9	Stabat	12.00	11.00	12.00	15.00	19.00	8.00	5.00	8.00	7.00	11.00	14.00	15.00	137.00
10	Wampu	12.00	15.00	12.00	8.00	12.00	14.00	8.00	9.00	8.00	11.00	16.00	17.00	142.00
11	Secanggang	13.00	15.00	27.00	30.00	11.00	13.00	10.00	10.00	13.00	20.00	9.00	10.00	181.00
12	Bt. Serangan	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	17.00
13	Sw. Seberang	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00
14	Pd. Tualang	15.00	10.00	12.00	34.00	28.00	13.00	7.00	5.00	9.00	5.00	7.00	12.00	157.00
15	Hinai	10.00	7.00	4.00	24.00	9.00	8.00	5.00	27.00	10.00	3.00	12.00	10.00	129.00
16	Tj. Pura	15.00	15.00	14.00	8.00	8.00	8.00	15.00	26.00	15.00	13.00	17.00	10.00	164.00
17	Gebang	12.00	4.00	9.00	11.00	17.00	11.00	10.00	2.00	12.00	4.00	12.00	10.00	114.00
18	Babalan	14.00	20.00	10.00	28.00	13.00	15.00	11.00	7.00	15.00	8.00	15.00	11.00	167.00
19	Sei Lapan	12.00	17.00	9.00	11.00	14.00	11.00	7.00	5.00	13.00	7.00	14.00	15.00	135.00
20	Brd. Barat	8.00	10.00	8.00	9.00	12.00	7.00	6.00	2.00	8.00	4.00	11.00	12.00	97.00
21	Besitang	7.00	11.00	11.00	8.00	10.00	6.00	5.00	3.00	7.00	7.00	9.00	13.00	97.00
22	Pematang Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Pkl. Susu	11.00	8.00	9.00	7.00	14.00	11.00	10.00	8.00	10.00	7.00	12.00	13.00	120.00
	Jumlah	219.00	225.00	198.00	272.00	235.00	190.00	152.00	150.00	199.00	167.00	215.00	245.00	2,480.00

PL. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN DAERAH Ekbangros

KABAG. HUKUM

KASUBAG. T. Hukum

STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU